

Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Seminar Nasional Pemanfaatan dan Pendayagunaan Lahan Terlantar
Menuju Implementasi Reforma Agraria (2012 : Bogor)

Prosiding Seminar Nasional Pemanfaatan dan Pendayagunaan Lahan
Terlantar Menuju Implementasi Reforma Agraria / penyunting, Dewa K.S.
Swastika, Kedi Suradisastra, Budiman Hutabarat – Bogor : Pusat Sosial
Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. 2013.

426 hlm. ; 17,5 x 24,5 cm

Termasuk bibliografi,
ISBN 978-979-3566-95-5

1. Lahan pertanian – Kongres dan konvensi. I. Judul
II. Dewa K.S. Swastika. III. Kedi Suradisastra IV. Hutabarat,
Budiman

631.406

Penyunting :

Dewa K.S. Swastika (Ketua)
Kedi Suradisastra (Anggota)
Budiman Hutabarat (Anggota)

Penyunting Pelaksana :

Ashari
Wartiningsih
Sri Sunari

Desain dan Tata Letak :

Agus Suwito
Ibnu Salman

Diterbitkan oleh :

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Kementerian Pertanian, 2012

Jl. A. Yani No. 70, Bogor 16161

Telp. : (0251) 8333964, 8325177

Fax. : (0251) 8314496

E-mail : publikasi_psekp@yahoo.co.id

Website : <http://www.pse.litbang.deptan.go.id>

Prosiding Seminar Nasional Pemanfaatan dan Pendayagunaan Lahan Terlantar Menuju Implementasi Reforma Agraria

Penyunting :

**Dewa K.S. Swastika
Kedi Suradisastra
Budiman Hutabarat**



**Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Kementerian Pertanian
2013**

KATA PENGANTAR

Dalam upaya memperbaiki akses petani terhadap lahan, salah satu bentuk peluang yang bisa dilaksanakan saat ini adalah dengan memanfaatkan lahan-lahan terlantar. Berdasarkan data, terdapat ratusan ribu hektar lahan yang tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Dalam aturan ini, jika tanah yang dimiliki pemegang hak tidak digunakan selama tiga tahun, pemerintah akan menertibkan haknya. Namun sampai saat ini implementasi kebijakan ini pun sangat lambat, sehingga untuk mendorong pelaksanaan kebijakan yang strategis ini dibutuhkan kesepahaman dan rumusan kebijakan yang lebih aplikatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian telah berinisiatif menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema: "PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN LAHAN TERLANTAR MENUJU IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA". Ada tiga tujuan dari penyelenggaraan Seminar Nasional tersebut yaitu: (1) Memperoleh gambaran terkini terkait potensi lahan terlantar dan pemanfaatannya untuk sektor pertanian, (2) Menghimpun informasi terkait kendala-kendala pemanfaatan lahan terlantar untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria, dan (3) Merumuskan kebijakan dan bahan roadmap bagi upaya memanfaatkan lahan-lahan terlantar untuk peningkatan kesejahteraan petani secara legal, sistematis, saling menguntungkan, dan berkelanjutan.

Buku Prosiding Seminar Nasional "PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN LAHAN TERLANTAR MENUJU IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA" merupakan kumpulan dari berbagai makalah dari narasumber utama dan makalah penunjang. Selain itu, Buku Prosiding juga memuat rumusan seminar yang merupakan intisari dari berbagai makalah yang dipresentasikan serta himpunan dari pendapat saran, opini selama penyelenggaraan seminar. Pada kesempatan ini, kami sampaikan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah bekerja keras untuk mewujudkan penyusunan Buku Prosiding ini. Mudah-mudahan Buku Prosiding ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Bogor, Juli 2013

Kepala Pusat,

Dr. Handewi Purwati Saliem
NIP. 19570604 198103 2 001

LAPORAN KETUA PANITIA

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Yang terhormat,

- Bapak Prof. Dr. Syarifudin Baharsyah
- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian
- Bapak/Ibu Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian dan Luar Kementerian Pertanian atau yang mewakili.
- Bapak Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pembangunan Pertanian
- Bapak/Ibu Pejabat Eselon II Lingkup Kementerian Pertanian dan Luar Kementerian Pertanian atau yang mewakili
- Para Pembicara, Pembahas dan Moderator
- Para Undangan dan Hadirin yang berbahagia

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti acara Seminar Nasional "Pemanfaatan dan Pendayagunaan Lahan Terlantar Menuju Implementasi Reforma Agraria". Kami selaku ketua panitia menyampaikan Selamat Datang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di acara seminar nasional ini

Hadirin dan Undangan yang saya hormati,

Akses terhadap lahan secara memadai, merupakan kunci bagi tercapainya kesejahteraan petani. Dalam upaya memperbaiki akses petani terhadap lahan, salah satu peluang yang bisa dilaksanakan saat ini adalah pemanfaatan lahan-lahan terlantar. Berdasarkan data, terdapat ratusan ribu hektar lahan yang tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Pada tahun 2010, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Namun, sampai saat ini implementasi kebijakan ini pun sangat lambat sehingga diperlukan berbagai upaya untuk mendorong percepatan pelaksanaan kebijakan strategis ini dengan cara membangun kesepahaman dan perumusan kebijakan yang lebih aplikatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian berinisiatif menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema: "PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN LAHAN TERLANTAR MENUJU IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA". Kegiatan Seminar Nasional ini diharapkan dapat menjadi ajang tukar pikiran antar stakeholder yang terkait dengan reforma agraria diantaranya: Kementerian Pertanian, Kementerian

Kehutanan, BPN, Perguruan Tinggi, LSM dan pemerhati masalah agraria, petani, dan kelompok masyarakat lainnya.

Adapun tujuan penyelenggaraan Seminar Nasional:

- Memperoleh gambaran terkini terkait potensi lahan terlantar dan pemanfaatannya untuk sektor pertanian
- Menghimpun informasi terkait kendala-kendala pemanfaatan lahan terlantar untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria
- Merumuskan kebijakan dan bahan roadmap bagi upaya memanfaatkan lahan-lahan terlantar untuk peningkatan kesejahteraan petani secara legal, sistematis, saling menguntungkan, dan berkelanjutan.

Perlu kami sampaikan, bahwa sebelum penyelenggaraan Seminar Nasional ini, telah dilakukan diskusi ilmiah terbatas dengan berbagai pihak yang memiliki wewenang dan *concern* terhadap permasalahan reforma agraria seperti Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian dan Pusat Kajian Agraria IPB. Dari hasil diskusi terbatas kemudian kami menyusun materi-materi yang dipandang relevan untuk dipresentasikan dalam Seminar Nasional ini.

Hadirin dan Undangan yang saya hormati,

Peserta yang hadir pada seminar ini diharapkan sebanyak 200 orang dari berbagai profesi dan instansi antara lain: kalangan akademisi, peneliti, pakar, birokrat, praktisi, perwakilan lembaga swadaya masyarakat. Cakupan materi yang akan disampaikan dalam Seminar Nasional difokuskan pada bahasan yang mengangkat potensi dan permasalahan pemanfaatan lahan terlantar untuk sektor pertanian dari berbagai sudut pandang baik menyangkut aspek teknis, sosial, ekonomi, hukum dan kebijakan. Materi seminar terdiri dari dua sumber yaitu pemakalah utama yang diundang secara khusus dan merupakan pakar di bidangnya serta makalah penunjang dari peneliti/akademisi maupun pemerhati masalah agraria. Adapun makalah utama dari para pakar adalah sebagai berikut:

- Inovasi Teknologi Pertanian dalam Pemanfaatan Lahan Terlantar (Kepala Badan Litbang Pertanian)
- Pemetaan Lahan Terlantar dan Persoalan dalam Pemanfaatan Sebagai Objek Land Reform (Badan Pertanahan Nasional-RI)
- Lahan terlantar di Kawasan Kehutanan dan Pola Pemanfaatannya (Ditjen Planologi, Kementerian Kehutanan)
- Perjalanan Reforma Agraria di Indonesia: Kendala dan usulan Solusi (Dr (HC) Gunawan Wiradi/Pusat Kajian Agraria, IPB)
- Tinjauan Yuridis dan Aspek Hukum Pemanfaatan Lahan Terlantar Mendukung Reforma Agraria (Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, UGM)
- Reforma Agraria dan Kesejahteraan Petani (Kepala PSEKP)

- Lesson Learned Pemanfaatan Lahan Terlantar untuk Perbaikan Distribusi Lahan Bagi Petani (LSM Konsorsium Pembaharuan Agraria)

Sementara bertindak sebagai pembahas adalah Dr. Agus Pakpahan (Pakar Ekonomi Kelembagaan dan Peneliti senior PSE-KP) dan Dr. Arya H. Darmawan (Sosiolog Institut Pertanian Bogor). Adapun untuk makalah penunjang, akan dipresentasikan 23 makalah para peneliti maupun akademisi dari berbagai lembaga penelitian lingkup kementerian pertanian/kementerian lainnya maupun di universitas. Makalah-makalah tersebut merupakan hasil-hasil penelitian maupun review yang telah diseleksi oleh Tim Penyeleksi dan siang nanti akan dipresentasikan yang dibagi menjadi 3 kelompok.

Hadirin yang berbahagia,

Mengakhiri sambutan ini, selanjutnya, kami mohon kepada Bapak Kepala Badan Litbang Pertanian, pada saatnya nanti untuk berkenan memberikan arahan dan sekaligus membuka acara secara resmi seminar ini. Kepada rekan-rekan panitia saya ucapkan terima kasih telah mempersiapkan seminar ini dengan baik. Akhirnya, kepada para peserta saya ucapkan selamat berseminar dengan harapan semoga seminar ini mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan ada tindak lanjut yang kongkret dari seluruh stakeholder terkait sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan kejayaan pembangunan pertanian Indonesia.

Wabillahi Taufiq Walhidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Bogor, 28 Nopember 2012

Ketua Panitia

Prof. Dr. Erizal Jamal

SAMBUTAN KEPALA BADAN LITBANG PERTANIAN

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Yang Saya Hormati :

- Prof. Dr. Syarifudin Baharsyah dan Prof. Dr. Justika Baharsjah
- Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pembangunan Pertanian.
- Para Pejabat Eselon II Lingkup Kementerian Pertanian dan Kementerian/Lembaga Lainnya
- Para Pembicara, Pembahas dan Tamu Undangan lainnya
- Para Peserta Seminar dan Hadirin sekalian yang berbahagia

Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, khususnya nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul bersama menghadiri acara seminar pada hari ini .

Pagi ini saya mendapat dua tugas dari panitia, pertama untuk membuka kegiatan ini secara resmi dan yang kedua menyampaikan *keynote speech* dengan topik **INOVASI TEKNOLOGI PERTANIAN DALAM PEMANFAATAN LAHAN TERLANTAR.**

Untuk itu ijinkanlah saya terlebih dahulu membuka acara ini, dengan mengucapkan **Bismilahirrahmanirohim** saya nyatakan Seminar Nasional BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN dengan Tema "PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN LAHAN TERLANTAR MENUJU IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA" secara resmi **dibuka.**

Semoga melalui seminar ini akan lahir pemikiran-pemikiran bernas untuk memecahkan berbagai kebuntuan yang dihadapi dalam memperbaiki penguasaan lahan di tingkat petani, melalui pemanfaatan lahan terlantar. Ini semua merupakan bagian dari upaya kita untuk mewujudkan reforma agraria, sebagaimana yang diamanatkan Tap MPR Nomor IX/MPR/2001, tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

• Hadirin yang saya hormati,

Kalau kita cermati dengan baik, berbagai pemikiran dan gagasan tentang pembaruan agraria, sudah banyak kita telaah dan bicarakan. Pada hari ini beberapa pakar yang mumpuni dalam bidang ini, seperti Bapak Dr. Gunawan Wiradi dan Ibu Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono juga hadir dan akan menyampaikan paparannya dihadapan kita semua. Saya percaya kita semua sudah paham betul berbagai permasalahan dalam upaya kita untuk

mengimplementasikan reforma agraria di negeri ini. Karena itu saya berharap kita semua pada hari ini tidak lagi terjebak dalam diskusi akademik tentang isu reforma agraria, namun harus lebih menitik pada upaya implementasinya, terutama melalui pemanfaatan lahan terlantar.

Kenapa saya memberikan perhatian lebih pada upaya implementasi ini, karena berbagai persoalan terkait dengan ketimpangan penguasaan lahan sudah sampai pada taraf yang menguatirkan kita semua. Berbagai konflik vertikal dan horizontal di beberapa tempat, dipicu oleh persoalan ketimpangan ini.

Untuk sekadar mengingatkan kita semua, data Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengungkapkan, bahwa gini rasio untuk distribusi lahan di Indonesia saat ini ada pada angka 0,562 ini berarti distribusi lahan sudah berada pada ketimpangan tinggi. Data lain dari BPN mengungkapkan bahwa 56 persen aset yang ada di Indonesia, baik berupa properti, tanah, maupun perkebunan, dikuasai hanya oleh 0,2 persen penduduk Indonesia.

Hadirin yang saya hormati,

Salah satu penyebab dari ketimpangan ini adalah terbatasnya lahan yang siap dimanfaatkan bagi kegiatan pertanian. Kementerian Pertanian sejak awal menargetkan adanya pencetakan areal pertanian baru, utamanya sawah minimal 100.000 hektar setiap tahunnya, namun dalam kenyataannya jumlah ini sangat sulit untuk dicapai, terutama karena sulitnya untuk mendapatkan lahan yang bisa dicetak menjadi lahan pertanian.

Data yang kami miliki di Kementerian Pertanian dari hasil pemetaan yang dilakukan Badan Litbang Pertanian, menunjukkan potensi lahan untuk pertanian tersedia secara memadai. Total luas lahan yang cocok untuk kegiatan pertanian di Indonesia saat ini sekitar 70 juta hektar. Dari jumlah tersebut yang efektif untuk produksi pertanian baru sekitar 45 juta hektar.

Sementara itu produk pangan utama kita, dalam hal ini beras, dihasilkan dari lahan sawah seluas 7,9 juta hektar. Sisanya antara lain berupa lahan kering seluas 15,6 juta. Luas lahan sawah cenderung berkurang sebagai akibat alih fungsi lahan, dengan besaran sekitar 50-70 ribu ha per tahun, sementara pencetakan sawah baru hanya bisa kita lakukan sekitar 20-40 ribu hektar per tahun.

Luasan lahan seperti di atas harus dibagi oleh sekitar 25,6 juta rumah tangga petani yang ada di pedesaan Indonesia. Sehingga penguasaan per rumah tangga sangatlah sempit. Kalau kita buat perbandingan secara sederhana antar negara, untuk setiap penduduk Indonesia saat ini tersedia lahan pertanian seluas 558 meter persegi, jumlah ini jauh lebih kecil dari Vietnam yang ketersediaan lahan pertanian per kapitanya 960 meter persegi, apalagi bila dibandingkan dengan Thailand yang rata-ratanya ada pada angka 5.230 meter persegi.

Hadirin yang saya hormati,

Bila keadaan di atas tidak ada perbaikan dalam 5-10 tahun ke depan, selain persoalan konflik sebagaimana yang saya sampaikan di atas, ada tantangan lain yang harus kita jawab yaitu bagaimana kita dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakat.

Sebagai gambaran bagi saudara sekalian, perhitungan kami sampai tahun 2025, untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat diperlukan lahan sawah 2,295 juta hektar, lahan kering 5,875 juta hektar. Sementara itu untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi khususnya komoditas ekspor (perkebunan dan hortikultura) dibutuhkan tambahan 250-350 ribu hektar lahan per-tahun.

Terkait dengan pemanfaatan lahan terlantar untuk kegiatan pertanian, berbagai upaya telah kita lakukan, baik dalam tataran kebijakan ataupun program khusus. Pada tanggal 23 Juli 2012, Menteri Pertanian telah melakukan pertemuan dengan kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk membicarakan upaya pemanfaatan lahan terlantar.

Pada saat pertemuan tersebut telah dibicarakan berbagai permasalahan dalam pemanfaatan lahan terlantar, beserta upaya yang perlu dilakukan ke depan. Persoalan utama kita belum tersedia data yang akurat tentang luasan lahan terlantar, beserta kondisi fisik lahan, dalam kaitannya dengan pemanfaatan untuk kegiatan pertanian. Data BPN awalnya menyebut Lahan Terlantar sekitar 7,2 juta hektar, kemudian dikoreksi menjadi 4,8 juta hektar, dikoreksi lagi menjadi 2,1 juta hektar. Setelah ditelusuri lebih jauh yang betul-betul siap untuk kegiatan pertanian luasannya jauh lebih kecil lagi.

Kalaupun lahan terlantar yang teridentifikasi cocok untuk kegiatan pertanian, proses untuk mendapatkannya sampai dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, masih memerlukan proses yang panjang.

Hadirin yang saya hormati,

Upaya yang perlu kita lakukan ke depan, adalah kerja bersama terutama antara Kementerian Pertanian, Bakosurtanal, BPN, Kehutanan, Perguruan Tinggi dan NGO untuk melihat lagi data fisik lahan dan kesiapannya untuk dimanfaatkan bagi kegiatan pertanian. Dari aspek sosial ekonomi dan budaya juga diperlukan penelaahan berbagai persoalan hukum dan masalah sosial, ekonomi dan budaya.

Kerja bersama akan mudah, bila upaya ini kita mulai dari data lahan terlantar yang telah dikompilasi BPN. Dalam bayangan saya, bisa saja diambil beberapa kasus lahan terlantar, kemudian dipelajari bersama-sama kemungkinan pemanfaatannya untuk kegiatan Pertanian.

Beberapa masalah yang perlu pemecahan segera antara lain: (1) Kesiapan lahan untuk dimanfaatkan bagi kegiatan pertanian, (2) Kesiapan petani yang akan menggarap, pola distribusi dan luas minimum, (3) Infrastruktur penunjang yang perlu tersedia. BPN telah merancang mekanisme Reforma Agraria dalam upaya

pengaturan Objek (Lahan) dan Subjek (Manusia), ini bisa menjadi modal awal untuk pembahasan lebih lanjut.

Saya memandang kerja bersama ini perlu dipayungi oleh semacam konsorsium untuk pemanfaatan lahan terlantar bagi kegiatan Pertanian. Konsorsium ini beranggotakan institusi Lintas Kementerian dan Lembaga, NGO, Perguruan Tinggi dan para pihak yang peduli pada isu ini.

Terkait dengan teknologi, dapat kami sampaikan bahwa Badan Litbang Pertanian siap mendukung upaya pemanfaatan lahan terlantar ini, melalui berbagai inovasi yang telah dihasilkan berbagai unit kerja kami, mulai dari aspek fisik sampai pada persoalan kelembagaan.

Hadirin yang berbahagia,

Itulah beberapa upaya yang sedang dan akan terus kami lakukan dalam upaya mewujudkan reforma agraria di negeri ini. Kami sadar masih banyak hal yang perlu disiasati, sehingga partisipasi para pihak terkait menjadi maksimum dalam perwujudan cita-cita tersebut.

Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, mudahan-mudahan berguna bagi upaya kita bersama di dalam membangun sektor pertanian yang tangguh di masa mendatang, sehingga mampu memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat pertanian khususnya, serta bagi seluruh rakyat Indonesia.

Billahit taufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Kepala Badan,

Dr. Ir. Haryono, MSc.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
LAPORAN KETUA PANITIA	iii
SAMBUTAN KEPALA BADAN LITBANG PERTANIAN	vi
DAFTAR ISI	xi
RUMUSAN SEMINAR NASIONAL	xv

MAKALAH UTAMA

1. Tanah Terlantar : Penertiban dan Pendayagunaannya untuk Landreform	3
<i>Budi Mulyanto</i>	
2. Pemanfaatan Tanah-Tanah Terlantar dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional	15
<i>Tri Joko Mulyono</i>	
3. Reforma Agraria dan Kesejahteraan Petani: Rekapitulasi Hasil Penelitian 35 Tahun PSE-KP	23
<i>Handewi P. Saliem dan Syahyuti</i>	
4. Aspek Hukum Pendayagunaan Tanah Terlantar dalam Rangka Mendukung Reforma Agraria	39
<i>Maria S.W. Sumardjono</i>	
5. Perjalanan Reforma Agraria di Indonesia: Kendala dan Kemungkinan Solusinya	42
<i>Gunawan Wiradi</i>	
6. Pemanfaatan Tanah Terlantar oleh Rakyat dalam Rangka Reforma Agraria	51
<i>Iwan Nurdin</i>	
7. Inovasi Teknologi Pertanian dalam Pemanfaatan Lahan Terlantar	60
<i>Haryono</i>	

MAKALAH PENUNJANG

A. INOVASI TEKNOLOGI BADAN LITBANG

1. Penentuan Zona Agroekologi dan Perencanaan Penggunaan Lahan di Kabupaten Boyolali Menggunakan Sistem AUTOZAE Version 1 Dalam Rangka untuk Menyusun Model Ketahanan Pangan Wilayah	75
<i>Bistok Simanjuntak</i>	

75

2. Meningkatkan Pendapatan Petani di Lahan Lebak Dangkal dengan Penerapan Pola Tanam Padi-Palawija	95
<i>Aidi Noor</i>	
3. Peranan Pembena Tanah untuk Perbaikan Kualitas Tanah, Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Efisiensi Penggunaan Pupuk pada Lahan Kering di Panjalu, Ciamis, Jawa Barat	104
<i>Ai Dariah, Neneng L. Nurida, dan Sutono</i>	
4. Karakterisasi dan Evaluasi Kesesuaian Lahan Kering Masam untuk Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit di Kebun Plasma Sei Tapung Provinsi Riau.....	115
<i>I Gusti Putu Wigena dan Andriati</i>	
 B. OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN	
1. Pemodelan Alternatif Keputusan Petani dalam Pemanfaatan Lahan Pertanian untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan.....	133
<i>Yudi L. A. Salampessy, Sahiral Yakub, Rusma, dan Weksi Budiaji</i>	
2. Pemanfaatan Lahan Bekas Galian Pasir dengan Hijauan Pakan Ternak (Studi Kasus di Desa Cibeureum Wetan, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang)	148
<i>Siti Lia Mulijanti dan B. Nurbaeti</i>	
3. Potensi Lahan Kering Dalam dan Luar Kawasan Hutan untuk Peningkatan Produksi Pangan	159
<i>Komalawati dan Agus Hermawan</i>	
4. Lahan Marginal untuk Pengembangan Kenaf (<i>Hibiscus cannabinus</i> L.) di Provinsi Kalimantan Timur.....	169
<i>Tarbiyatul Munawaroh, Muryani Purnamasari, dan Noor Roufiq Ahmadi</i>	
5. Pemanfaatan Lahan Alang-Alang yang Terlantar untuk Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Berkelanjutan	179
<i>Ishak Juarsah</i>	
6. Upaya Pengelolaan Lahan Tidur dengan Memanfaatkan Sisa Air Hujan di Lahan Kering Timor Barat.....	190
<i>B. Murdolelono, H. Da Silva, dan B. de Rosari</i>	
7. Inventarisasi Potensi Sumber Daya Alam untuk Mendukung Pemanfaatan Lahan Suboptimal : Studi Kasus di Singkawang, Kalimantan Barat.....	199
<i>Edy Syafril Hayat, Sri Andayani, dan Rita Hayati</i>	
8. Potensi dan Kendala dalam Pengelolaan Lahan Suboptimal Pasang Surut untuk Peningkatan Kesejahteraan Petani di Sambas, Kalimantan Barat.....	213
<i>Dwi P. Widiastuti</i>	

9. Optimalisasi Lahan Terlantar Sekitar Perbukitan Tambang Kapur Gunung Kidul melalui Integrasi Tanaman Ubikayu - Kambing	225
<i>Arlyna B. Pustika, Supriyati, dan C. Prasetyono</i>	
10. Pertanian Berkelanjutan di Lahan Gambut Mendukung Implementasi Pemanfaatan dan Pendayagunaan Lahan Marjinal: Terlantar	237
<i>Roosganda Elizabeth</i>	
11. Pemanfaatan Lahan Kering pada Kawasan Areal Hutan Tanaman Industri (HTI) Jati Muda untuk Budidaya Padi Gogo..	254
<i>Widyantoro, Priatna Sasmita, Husin M. Toha, dan Made J. Mejaya</i>	
C. STATUS PENGUASAAN LAHAN DAN REFORMA AGRARIA	
1. Status Penguasaan Lahan dan Hubungannya dengan Produksi Padi di Provinsi Banten	269
<i>Viktor Siagian</i>	
2. Reforma Agraria dan Politik Dibalik Kancah Perebutan Penguasaan Lahan Terlantar di Kawasan Hutan Negara	280
<i>Lukas R. Wibowo dan Ismatul Hakim</i>	
3. Strategi Pengembangan Konsolidasi Lahan Sawah di Jawa Barat	295
<i>Trisna Subarna</i>	
4. Dukungan Penguasaan dan Pengusahaan Lahan Usahatani Padi di Kecamatan Rengasdengklok dan Karawang Barat Guna Mewujudkan Ketahanan Pangan.....	315
<i>Wasito</i>	
5. Konsistensi Peraturan Perundangan dengan Penerapannya dalam Peraturan Daerah (PERDA) Khususnya pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.....	334
<i>Chairul Muslim</i>	
D. LAIN-LAIN	
1. Hubungan antara Kehilangan Hasil Padi pada Lahan Sub Optimal dengan Pendapatan Petani di Kalimantan Barat.....	355
<i>Jhon David H.</i>	
2. Potret Petani Padi Rawa dan Non Rawa yang Memanfaatkan Kearifan Lokal Pertanian	366
<i>Maria</i>	
3. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Petani Keputusan Petani terhadap Adopsi Konservasi Lahan Kering di Dataran Tinggi Iklim Kering Pulau Timor, NTT	379
<i>Helena da Silva, Bambang Murdolelono, dan Bernard deRosari</i>	

RUMUSAN SEMINAR NASIONAL

Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam mengamanatkan pelaksanaan reforma agraria. Namun sampai penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, pelaksanaan reforma agraria masih berjalan di tempat. Di satu sisi, petani membutuhkan lahan sebagai titik ungkit peningkatan produksi pangan dan pendapatan petani, di sisi lain terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akses petani terhadap lahan, yakni lahan-lahan terlantar, namun belum diakses oleh petani. Hasil inventarisasi PBN bahwa luas lahan terlantar di Indonesia mencapai 7,2 juta hektar, namun penetapannya sebagai lahan terlantar dan redistribusinya kepada masyarakat petani masih menghadapi berbagai kendala.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema "Pemanfaatan Dan Pendayagunaan Lahan Terlantar Menuju Implementasi Reforma Agraria" pada hari Rabu tanggal 28 November 2012, bertempat di IPB International Convention Center, Jl. Raya Pajajaran Bogor. Seminar menampilkan 1 (satu) *keynote speaker* dan 6 (enam) pembicara utama yang membahas masalah Inovasi Teknologi Pertanian, Pemetaan Lahan Terlantar, Lesson Learned Pemanfaatan Lahan Terlantar, Sejarah Perjalanan Reforma Agraria, Aspek Hukum Pemanfaatan Lahan Terlantar serta Kesejahteraan Petani. Rumusan seminar nasional tersebut disajikan di bawah ini:

1. Definisi atau nomenklatur lahan terlantar masih belum seragam. Hal ini tercermin dari PP No.36/1998 Jo Kepts. Ka. BPN 24/2002 dan PP No.11/2010 Jo Perkaban 4/2010, yang menunjukkan ketidak konsistenan persepsi terhadap definisi lahan terlantar.
2. Wadah pengaturan reforma agraria, yakni Peraturan Pemerintah secara hukum dipandang kurang tepat, sehingga perlu disempurnakan substansinya dan ditingkatkan pengaturannya dalam bentuk Undang-Undang.
3. Sejak pemerintahan Orde Baru berakhir sampai saat ini sikap politik masyarakat Indonesia belum jelas. Lebih jauh lagi, sampai saat ini masih sulit menemukan fakta penetapan lahan terlantar oleh BPN dan "redistribusi" lahan tersebut kepada masyarakat. Penerbitan PP No.11/2010 sebagai revisi dari PP No.36/1998 belum memperlihatkan kemajuan yang berarti dalam pelaksanaan reforma agraria. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh banyaknya lahan terlantar yang sudah digarap, namun statusnya sebagai lahan yang dapat didistribusikan kepada masyarakat belum ditetapkan. Di sisi lain, lahan terlantar yang sudah dimanfaatkan kembali oleh investor baru dan bermitra dengan Pemda dan masyarakat, justru ditetapkan sebagai lahan terlantar, sehingga menimbulkan permasalahan baru, baik dengan investor, pemerintah daerah, maupun masyarakat.
4. Menjalankan penertiban dan pendayagunaan lahan terlantar bukan semata-mata menata aset lahan, melainkan juga merupakan bagian dari penyelesaian

berbagai konflik pertanahan dan transformasi ekonomi masyarakat di atas lahan yang pernah ditelantarkan oleh pemegang HGU lama. Guna mengatasi hal ini semua komponen bangsa harus bersedia duduk bersama untuk merumuskan "*grand design*" reforma agraria, disertai sosialisasi yang intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang makna reforma agraria.

5. Seluruh dasar hukum terkait pemanfaatan tanah, yang dipandu oleh Pasal 33 UUD 1945, ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, keadilan penguasaan dan pemilikan tanah, keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia, serta harmoni sosial. Namun dalam perjalanan menuju sasaran tersebut terdapat hambatan yang kompleks mulai dari masalah penataan ruang sampai *land grabbing* dan penyelundupan hukum. Komplikasi politik dan hukum keagrariaan telah membentuk struktur umum penggunaan dan pemanfaatan tanah secara nasional sebagai akibat ketimpangan kebijakan pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah. Di sisi lain, upaya penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar yang dituangkan dalam PP No.11/2010 menghasilkan konsensus bahwa tanah yang diusulkan sebagai terlantar dinyatakan dalam kondisi *status-quo* sampai penetapan tanah terlantar diterbitkan.
6. Berbagai kontradiksi kebijakan dan implementasinya, ditengarai menimbulkan berbagai persoalan internal di dalam tubuh kelembagaan itu sendiri, yang menghambat penertiban tanah terlantar dan hambatan hukum setelah lahan tertentu ditetapkan sebagai tanah terlantar. Akibatnya, lahan tersebut menjadi terlambat didayagunakan, sehingga Indonesia belum bisa terlepas dari krisis lahan.
7. Terlepas dari berbagai kontradiksi kebijakan, dijumpai kasus-kasus yang menunjukkan keberhasilan masyarakat, baik atas inisiatif masyarakat sendiri maupun melalui kemitraan dengan berbagai instansi, memanfaatkan lahan terlantar yang telah habis HGU-nya, sebagai lahan pertanian palawija, tambak ikan bandeng dan sabuk hijau hutan bakau. Dalam kasus tertentu, sabuk hijau hutan bakau yang dibangun masyarakat mendapat penghargaan pemerintah dan menjadi tempat belajar menanam bakau dari berbagai pelosok nusantara.
8. Pendayagunaan tanah terlantar seyogyanya dilakukan melalui reforma agraria, dan ditujukan untuk merespon program strategis negara, serta didayagunakan sebagai cadangan negara. Hal ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, terutama pertimbangan untuk mencegah atau mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, mengurangi sengketa dan konflik pertanahan dan lain-lain, termasuk merespon program-program strategis untuk mempertahankan keberlanjutan sumber daya agraria.
9. Data yang pasti tentang luas lahan terlantar beserta kondisi fisik lahan, dalam kaitannya dengan pemanfaatan untuk kegiatan pertanian belum tersedia. Bahkan ketepatan identifikasi lahan terlantar juga sangat lemah.
10. Banyak lahan-lahan yang walaupun telah teridentifikasi sebagai lahan terlantar dan cocok untuk pertanian, ternyata pemanfaatan lahan-lahan tersebut di

lapangan bukan untuk pertanian. Banyak juga lahan yang tidak cocok untuk pertanian tetapi dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian.

11. Permasalahan terkait pertanahan dan agraria harus diatasi dengan melaksanakan reforma agraria secara konsisten dalam bentuk penataan sistem politik dan hukum pertanahan berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan UUPA, serta penyelenggaraan land-reform dan akses reform secara bersama yang mencakup alokasi tanah untuk rakyat dan memberikan akses untuk penggunaan dan pemanfaatan tanah.
12. Dalam kaitannya dengan lahan terlantar, penggunaan kawasan hutan untuk sektor non-kehutanan dapat bersifat permanen atau sementara. Guna memanfaatkan lahan kawasan hutan tersebut, telah tersedia berbagai landasan hukum (Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Inpres, Perpres, dan Permenhut) yang dapat diterapkan secara baik dan tepat. Terhadap kawasan HPK yang telah dilepas, pengurusan selanjutnya menjadi tanggung jawab instansi di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan terlantar diperlukan: (a) langkah pemetaan dan perbaikan ketepatan data, dan (b) pembentukan konsorsium untuk pemanfaatan lahan terlantar bagi kegiatan pertanian, yang dapat beranggotakan institusi lintas Kementerian dan Lembaga, LSM, Perguruan Tinggi dan para pihak yang peduli pada isu ini.

Tim Perumus,

Dewa Ketut Sadra Swastika
Kedi Suradisastra
Budiman Hutabarat

**PENENTUAN ZONA AGROEKOLOGI DAN PERENCANAAN
PENGUNAAN LAHAN DI KABUPATEN BOYOLALI
MENGUNAKAN SISTEM AUTOZAE VERSION 1 DALAM
RANGKA UNTUK MENYUSUN MODEL KETAHANAN PANGAN
WILAYAH**

***Determining Agroecology Zones and Planning Land Use Through
Autozae System Version 1 Application for Regional Food
Security Model in Boyolali Regency***

Bistok Simanjuntak dan Sri Yulianto JP

*Fakultas Pertanian Universitas Kristen Satya Wacana
Jl. Diponegoro 52 – 60 Salatiga 50711 Jawa Tengah
Email: bhasiholans@yahoo.com*

ABSTRACT

Based on the Schmidt - Ferguson type of climate, Boyolali is dominated by Climate Type C. which is a rather wet, with humidity of around 80 percent. Boyolali do not have a document of Agroecological zone (AEZ). Agroecological zone is a grouping of a region based on the physical condition of a similar environment, where variability of plants and animals are not expected to be significantly different. The main components of agroecological zone is the climate, physiographic regions and soil type. With AEZ analysis, we can obtain integrated and adequate information concerning: (1) the state of the environment in the region, (2) the suitability of crops and technologies in the region, (3) a variety of site-specific agricultural seed and technology needs, and (4) an input in order regional development planning and the development of specific commodities. AEZ maps can be used to direct the operational planning of agricultural development, because the map of AEZ contains comprehensive information about the biophysical potential of the region. The ideal farming systems based AEZ approach can be developed based on a combination of physical and local economy approaches. The system will have an effect on the increase in the aspect of food security. Food Security and Vulnerability Map of Indonesia is based on three pillars of food security, namely: (a) food availability, (b) access to food, and (c) utilization of food. Through AEZ, will be known characteristics and potential of the land for the development of a variety of food commodities, so people do not depend on just one source of food. Based on the above issues then do research on AEZ using AUTOZAE system Version 1 in Boyolali is conducted, to arrange alternative agricultural development, so that it will be able to prepare the ideal model of food security carrying capacity. The analysis for the determination of the Composite Food Security Index created by using Principal Component Analysis (PCA). The results of the analysis of the system AUTOZAE Version 1 showed that the composite index of food security at the sub-district level in Boyolali varies from low to moderate.

Key words : *agro ecological zone, climate, physiographic region, soil type, food security*

ABSTRAK

Berdasarkan tipe iklim Schmidt – Ferguson, Kabupaten Boyolali didominasi Tipe Iklim C. yaitu merupakan daerah yang agak basah, dengan kelembaban sekitar 80 persen.